

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai sistem pendistribusian gas LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru pada dasarnya dilakukan melalui jalur resmi, yaitu dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kepada agen, kemudian disalurkan kepada pangkalan, dan selanjutnya diterima oleh konsumen akhir. Dalam praktiknya, salah satu pangkalan di wilayah penelitian menerapkan sistem kartu kendali untuk mengatur pembelian LPG bersubsidi agar lebih merata kepada warga di wilayah RT setempat. Akan tetapi, pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi belum sepenuhnya seragam pada setiap wilayah. Pada sebagian wilayah, masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh LPG dari pangkalan karena keterbatasan waktu pengambilan, cepat habisnya stok, dan perbedaan domisili, sehingga sebagian masyarakat membeli LPG melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi.
2. Kendala-kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara meliputi terbatasnya akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi di

pangkalan, keterlambatan distribusi, cepat habisnya stok LPG, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta belum seragamnya pengendalian distribusi pada setiap wilayah. Harga LPG di pangkalan berada pada kisaran Rp22.000,00 per tabung, sedangkan harga di tingkat pengecer berkisar antara Rp30.000,00 sampai Rp50.000,00 per tabung. Kondisi tersebut cukup memberatkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan LPG untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kendala tersebut menunjukkan bahwa tujuan subsidi sebagai bentuk kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian distribusi yang lebih merata agar LPG bersubsidi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pangkalan resmi LPG, diharapkan dapat menyalurkan LPG bersubsidi secara lebih tertib, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem kartu kendali yang telah diterapkan pada salah satu wilayah dapat menjadi salah satu upaya pengendalian agar pembelian LPG bersubsidi tidak dilakukan secara berlebihan dan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan LPG bersubsidi.

2. Bagi pihak agen, pemerintah setempat, dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian LPG bersubsidi, baik dari segi ketersediaan stok, ketepatan sasaran, maupun harga jual di tingkat pangkalan dan pengecer. Pengawasan tersebut penting dilakukan agar pendistribusian LPG bersubsidi tidak hanya berjalan secara formal melalui jalur resmi, tetapi juga benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.
3. Bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, diharapkan dapat menggunakan LPG bersubsidi sesuai kebutuhan dan membeli melalui pangkalan resmi apabila memungkinkan. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar ketersediaan LPG bersubsidi dapat lebih merata. Bagi pelaku usaha mikro, diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak pangkalan atau pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi, sehingga kebutuhan usaha tetap dapat terpenuhi tanpa harus selalu bergantung pada pengecer dengan harga yang lebih tinggi.